PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Agesta Aprilia

Nim : 222016224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Agesta Aprilia

NIM : 222016224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Agesta Aprilia
NIM	: 222016224
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

6E346AJX331659142

Agesta Aprilia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang
Nama	: Agesta Aprilia
NIM	: 222016224
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Welly, SE., M.Si.
NIDN/NBM: 0206046303/784021	NIDN/NMB: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b.Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak, dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon."

Terucap syukur kepadamu
Ya Allah.....

Skripsi kupersembahkan kepada

- *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- *Adik dan Keluargaku Tersayang*
- *Pembimbing Skripsi*
- *Orang-orang Terdekat dan Teman-Teman Seperjuangan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang". Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat, dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.Drs.Sunardi,S.E.,M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Welly,SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran

dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.serta saudara- saudara ku yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Bapak Yudha Mahrom DS, S.E,.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepalaserta pegawai/staf di Instansi Pemerintah kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan skripsi penulis
6. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluargaku yang telah membantuku dalam berbagai hal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada Andre , Meta , Dona , Rati , Isty dan semua teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang, September 2021

Penulis,

Agesta Aprilia

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

HALAMAN LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori.. 9

1. *Good Government Governance* 10

a. Pengertian *Good Government Governance* 10

b. Indikator *Good Government Governance* 11

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 13

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 13

b. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 15

3. Kinerja Pemerintah Daerah 20

a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah..... 20

b. Tujuan Kinerja Pemerintah 21

c. Pengukuran Kinerja.... 23

B. Kerangka Pemikiran dan Penelitian Sebelumnya 30

C. Hipotesis 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 37

B. Lokasi Penelitian 38

C. Operasionalisasi Variabel 38

D. Populasi Penelitian 39

E. Data Yang Diperlukan..... 34

F. Metode Pengumpulan Data..... 42

G. Metode Pengujian Data 44

H. Analisis Data dan Teknik Analisis 45

1. Analisis Data 46

2. Teknik Analisis..... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 52

1. Profil Responden 53

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner 54

3. Pengujian Data 55

B. Pembahasan Hasil Penelitian 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 92

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Palembang 2013-2017 .	6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	28
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel III.2	Data Populasi Penelitian.....	33
Tabel IV.1	Profil Responden.....	46
Tabel IV.2	Pembagian Kuesioner.....	48
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas *Good Government Governance*	49
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern	51
Tabel IV.5	Hasil Uji Reliability *Good Government Governance*	51
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliability *Good Government Governance*.	52
Tabel IV.7	Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern	53
Tabel IV.8	Hasil Statistik Motif	54
Tabel IV.9	Hasil Statistik Sikap	55
Tabel IV.10	Hasil Statistik Konsep Diri	56
Tabel IV.11	Hasil Statistik Pengetahuan	57
Tabel IV.12	Hasil Statistik Keterampilan	57
Tabel IV.13	Frekuensi Variabel Kinerja Pemerintah	58
Tabel IV.14	Hasil Statistik Relevan	58
Tabel IV.15	Hasil Statistik Andal	59
Tabel IV.16	Hasil Statistik Dapat Dibandingkan.....	60

Tabel IV.17 Hasil Statistik Dapat Dipahami..... 60

Tabel IV.18 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana..... 63

Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 64

Tabel IV.20 Hasil Uji t..... 65

Tabel IV.21 Hasil Uji f 66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 29

Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot 61

Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Format Kuesioner
Lampiran 2	Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
Lampiran 3	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 5	Fotokopi Sertifikat Pelatihan SPSS
Lampiran 6	Biodata Penulis

ABSTRAK

Agesta Aprilia /222016244/2021/Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah pengaruh *Good Government Governance* dan sistem pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang, dengan Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Government Governance* dan sistem pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 81 orang pegawai di Kantor Pemerintah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Tehnik analisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Software Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa *Good Government Governance* dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang

Kata Kunci: *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

Agesta Aprilia /222016244/2021/ The Influence of Good Government Governance and Government Internal Control System on the Performance of the Palembang City Government.

This research was conducted to answer the existing problem, namely, how is the influence of Good Government Governance and internal control system on the performance of the Palembang City Government, with the aim of the study being to determine the magnitude of the influence of Good Government Governance and the internal control system on the performance of the Palembang City Government. This research includes associative research. The sample in this study was obtained as many as 81 employees at the Palembang City Government Office. The data used is secondary data. Methods of collecting data used were questionnaires and documentation. The data analysis used is quantitative analysis. The analysis technique uses descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression, coefficient of determination test and continued with F test (simultaneous) and t-test (partial). The data analysis technique in this study was assisted by the Software Statistical Program for Special Science (SPSS). The results of the analysis show that Good Government Governance and internal control systems affect the performance of the Palembang City Government

Keywords: Good Government Governance, Internal Control System and Government Performance

No	Nama	Nim	Keterangan
A20	Agesta Aprilia	222016244	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dalam mengontrol kebijakan pemerintah.Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya.Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya, serta berkomitmen yang tinggi guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang berbangsa bernegara, sebagai yang di amanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945.

Kinerja berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh *good government governance* karena sebagai mekanisme pengendalian yang efektif menyelaraskan kepentingan kinerja daerah.Serta memberikan perlindugan kepada pemerintah.Ada dua prinsip utama dalam GGG.Pertama kejelasan hak untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Iktikat pemerintah untuk melakukan pengungkapan (Cahyani: 2009).

Menurut Romney dan John Steinbart (2017: 198) kinerja berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk mencapai tujuan seperti perlindungan aset, menyimpan catatan secara terperinci, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, menyiapkan laporan

keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Hamdani (2016: 19) *good government governance* (GGG) turut membantu terciptanya hubungan yang kondusif, dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham).Hal tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen kepada dewan komisaris kepada pemegang saham.

Good government governance adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder).* GGG memacu terbentuknya pola manajemen yang propesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum *good government governance* Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh KNKG menyebut 5 asas GGG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Cahyani: 2009).

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhunya kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan nya yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian pengendalian intern merupkan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, beserta

mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaa organisasi dari berbagai arah, Mardi (2016: 59).

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Chabib, 2013:3).

Menurut Rachmat (2010: 316) kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk penilaian asas manfaat, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Kegagalan implementasi tata kelola perusahaaan semakin memburuk, kondisi ekonomi Indonesia.Kegagalan penerapan tata kelola menjadi salah satu pemicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir, perusahaan global pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan tata kelola.Betapa pentingnya penerapan tata kelola secara baik dan berkelanjutan. Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan (Muliaman, 2014).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) menunjukkan bahwa Hasil analisis hipotesis menunjukkan baik, *good government governance*, berpengaruh negatif dan pengendalian intern berpengarh positif dan signifikan pada kinerja pemerintah di kabupaten pelalawan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Febriana dan Aristanti (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan proksi PDRB per kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB per kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio-rasio kemandirian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2017 memperoleh hasil sangat tidak memuaskan.Rendahnya nilai kematangan maturitas ini disebabkan tidak terdokumentasikannya setiap kegiatan.Tidak adanya dokumentasi menjadi masalah tersendiri ketika melakukan kegiatan pemeriksaan kesatuan perangkat kerja daerah (SKPD).Buruknya penilaian yang diperoleh ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan waktu sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan (Siti, 2017).

Kinerja Pemkot Palembang dianggap tidak maksimal, dalam rapat paripurna yang membahas laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah (raperda), mengatakan saat ini masih ada program Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang tidak maksimal, contohnya dinas komunikasi dan informasi (kominfo) Palembang, sampai sekarang. Program *smart city* belum berjalan, padahal rancangan ini sudah ada sejak lama dan sudah masuk dalam anggaran (Fauzi, 2017).

Pemerintah kota Palembang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2017. Sesuai peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun angaran berakhir. Lambatnya penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) Dan Dinas Kesehatan (Dinkes) (Harobin, 2018).

Tabel 1.1

Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 s.d 2019

Sekretariat Kota Palembang

Entitas	Opini				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sekretariat Kota Palembang	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP

Sumber, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK: 2020

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah sekretariat Kota Palembang 2015s.d 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini yang diberikan oleh BPK terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang telah dipandang memuaskan, namun dari hasil tersebut dapat dilihat target pencapaian kinerja Kota Palembang masih tergolong rendah sehingga wajar apabila mendapatkan opini WTP dari BPK. Target tersebut dapat dilihat dari tabel Realisasi pencapaian Kinerja pada Tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.2
Realisasi Kinerja Sekretariat kota Palembang
Tahun 2015 s.d 2019

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	60	60	60	60
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	57,18	60,09	61,73	63,55	64,53

Sumber : *Sumber :LAKIP Kota Palembang, 2019*

Dari Tabel I.2 dapat dilihat bahwa walaupun nilai Akuntabilitas Pemerintah Kota Palembang selalu mendapatkan opini WTP dari BPK akan tetapi Pemerintah Kota Palembang merasa peningkatan nilai tersebut masih kurang signifikan dan masih jauh dari ekspektasi karena masih jauh dari pencapaian 100, sehingga Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Palembang beserta seluruh jajarannya melakukan pembelajaran secara langsung ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai tatacara menentukan Indikator Kinerja sasaran beserta targetnya, dimana hasil dari pembelajaran tersebut seluruh SKPD harus menghapus Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan output kegiatan dan

diganti atau digabungkan menjadi indikator kinerja *outcome* yang menggambarkan cangkupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD. Hasil pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari gamabr grafik berikut:

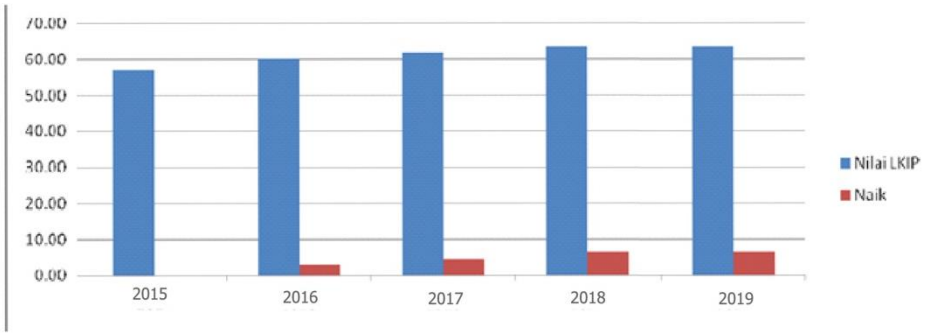

Gambar I.1
Hasil Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 2019, pencapaian kinerja pemerintah Kota Palembang masih belum termasuk kategori sangat baik, walau pencapaian realisasi target mencapai 100% akan tetapi indikator yang ditargetkan hanya mampu kategori B, seperti meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah di targetkan B dan menigkatnya transparansi, efektivitas serta efisiensi hanya mampu menargetkan nilai pencapaian B. Artinya bahwa masih ada kelemahan dari kinerja pemerintah daerah yang harus di perbaiki pada pemerintahan Kota Palembang.Disisi lain pada skor evaluasi SAKIP pemkot kota palembang berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah kota palembang tahun 2015-2019 menetapkan bahwa Pemkot Kota Palembang mendapatkan predikat B dengan nilai 61,73%, predikatnya sama dengan tahun

sebelumnya hanya nilainya naik sebesar 0,95% dari nilai sebelumnya sebesar 60,78 (korankito.com).

Selain kelemahan dan kekurangan pada pencapaian kinerja pemerintah Kota Palembang dari hasil Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 2019 juga dapat dilihat masih belum sempurnanya pencapaian *Good Government Governance* Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang terhadap sasaran strategis II dalam upaya meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi dapat dilihat dari indeks birokrasi reformasi berikut:

Tabel I.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2019

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan, dan Pemanfaatan Tanah	98,37
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	99,01
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81,25
				Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91,26
					Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan Daerah	91,43
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur,				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,22
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,71

2	Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam Menata Sistem Penyelengara an Pemerintah Untuk Memberika n Pelayan Prima Kepada Masyarakat	1	Meningkatny a Transparansi , Efektifitas, dan Efisiensi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98,87
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91,88
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	98,44
3	Meningkat kan Efektivitas Penyelengg ara- an Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan	86,15
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	94,85
				Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Mengintensifkan Penaganan Pengaduan Masyarakat	99,97

Sumber :LAKIP Kota Palembang, 2019

Berdasarkan capaian realisasi sasaran strategis di dalam membangun *good government governance* di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam Menata Sistem Penyelengaraan Pemerintah Untuk Memberikan Pelayan Prima Kepada Masyarakat dan Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dari kesemua indikator tersebut masih belum terealisasi 100%, sehingga masih terdapat beberapa kelemahan *good government governance* yang harus di tingkatkan lagi.

Permasalahan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) menurut PEMDA Kota Palembang atas hasil Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)

tahun 2019 setidaknya terdapat 15 permasalahan SPI Kota Palembang, diantaranya pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terdapat 2 permasalahan, Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terdapat 1 permasalahan, Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terdapat 1 permasalahan, Perencanaan kegiatan tidak memadai terdapat 2 permasalahan, Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terdapat 1 permasalahan, Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/ daerah tidak sesuai dengan ketentuan terdapat 1 permasalahan, Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terdapat 2 permasalahan, *Standard Operating Procedure* (SOP) belum disusun/tidak lengkap terdapat 3 permasalahan,*Standard Operating Procedure*(SOP) belum berjalan optimal terdapat 1 permasalahan dan Satuan Pengawas Intern tidak optimal terdapat 1 permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeingian untuk meneliti lebih lanjut tentang "Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah?

2. Bagaimanakah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah?
2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang telah diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah

   Memberikan sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan kinerja pemerintah.
3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian mahasiswa dosen untuk penulisan berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

Agung Firman Sampurna, 2018. *BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengendalian Internal Kementrian/Lembaga*. Antaranews, Jakarta. https://m.antaranews.com/berita/631918/bpk-soroti-lemahnya-sistem-pengendalian-internal-kementrianlembaga

Astuti, Retno Widia. "Pengaruh Good Public Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Ambon." Jurnal Akuntansi 6.2 (2020): 39-51.

Harobin Mustofa, 2018. *BPK Deadline Laporan Keuangan Pemkot Palembang.* Beritapagi.com. Palembang. http://beriapagi.co.id/2018/01/22/bpk-deadline-laporan-keuangan-pemkot-palembang.html

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2014). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat

Indonesia Corruption Watch, 2019.*Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Rendah.* Antikorupsi.org. Jakarta. https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/komitmen-pemberantasan-korupsi-pemerintah-daerah

Kewo, Cecilia Lelly, and Linda AO Tanor. "*Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?*." Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar.Vol. 11.No. 1. 2020.

Mahsun Mohamad, 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

MAULINA, NENSY SEPTIA. *pengaruh good corporate governance dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah.* Diss. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 2020.

.Muhammad Masykur, 2019.*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemkot Cilegon Level 3*.Kabarbanten.com, Banten.https://www.kabar-banten.com/sistem-pengendalian-intern-pemerintah-pemkot-cilegon-level-3/

Noval Hadi Praja, 2015. *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung).*Jurnal Fekom Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*